

**GAMBARAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN PADA KELUARGA PRA
SEJAHTERA DI RT 35 RW 04 KELURAHAN KOTAKULON
KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021**

Evy Maya Stefany, Riski Triandina P, Susilowati

ABSTRAK

Renstra Kemendikbud 2020-2024 adalah wajib belajar 9 tahun tuntas, wajib belajar 12 tahun meningkat dan akan memprioritaskan pada keluarga miskin. Kesiapan keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso dalam menyongsong program wajib belajar 12 tahun, perlu mengetahui gambaran pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian kuantitatif bentuk deskriptif dimana populasi adalah semua keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso berjumlah 24 KK dan sampel sebanyak 10 KK dengan kriteria keluarga pra sejahtera yang mempunyai anak usia 7-15 tahun. Data diperoleh melalui angket dan data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk persentase.

Hasil penelitian menunjukkan keluarga pra sejahtera dengan anak usia wajib belajar 9 tahun di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso adalah keluarga pra sejahtera yang mempunyai pekerjaan terbanyak adalah sebagai buruh tani dan pengamen masing-masing 30%. Keluarga pra sejahtera belum bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama perumahan semi permanen 60 % dan akses pelayanan kesehatan (tidak mempunyai KIS) 100%. Pelaksanaan anak wajib belajar 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SLTP tercapai 100% dan tidak ada yang tidak naik kelas.

Perlu peningkatan program PKK dalam menunjang pendidikan formal anak pada keluarga pra sejahtera.

Kata Kunci : Wajib Belajar 9 Tahun, Keluarga Pra Sejahtera.

ABSTRACT

The Strategic Plan of the Ministry of Education and Culture 2020-2024 is a complete 9-year compulsory education, an increase in 12-year compulsory education and will prioritize poor families. The readiness of pre-prosperous families in RT 35 RW 04 Kotakulon District, Bondowoso Regency in welcoming the 12-year compulsory education program, needs to know the description of the implementation of 9-year compulsory education in underprivileged families in RT 35 RW 04 Kotakulon District, Bondowoso Regency.

This type of quantitative research is a descriptive form where the population is all pre-prosperous families in RT 35 RW 04, Kotakulon District, Bondowoso Regency totaling 24 families and a sample of 10 families with the criteria of pre-

prosperous families having children aged 7-15 years. Data obtained through questionnaires and research data will be presented in the form of percentages.

The results showed that pre-prosperous families with 9-year-old compulsory education in RT 35 RW 04, Kotakulon District, Bondowoso Regency are pre-prosperous families who have the most jobs as farm laborers and buskers each 30%. Pre-prosperous families have not been able to meet the basic needs of the family, especially semi-permanent housing 60% and access to health services (do not have KIS) 100%. The implementation of the 9-year compulsory education, namely elementary and junior high school education, was achieved 100% and no one did not go to class.

It is necessary to increase the PKK program in supporting the formal education of children in pre-prosperous families.

Keywords: *9 years compulsory education, pre-prosperous family.*

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain : (1) Penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar, (2) Penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) Pendidikan untuk semua.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemikiran kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan dasar yang lebih tinggi . Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The

International Development Research Center, meliputi : (1) Kemampuan berkomunikasi; (2) Kemampuan dasar berhitung; (3) Pengetahuan dasar tentang negara, budaya dan sejarah; (4) Pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan yang didasari konsep “Pendidikan Dasar untuk Semua (Universal Basic Education)”. Hal ini juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Anak.

Bantuan dana BOS untuk pendidikan anak di Indonesia agar meringankan biaya pendidikan terutama bagi masyarakat miskin sehingga dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Kondisi masyarakat miskin semakin terpukul

lebih dalam bila harus mengeluarkan biaya pendidikan yang mengakibatkan angka anak putus sekolah meningkat dan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan disegala bidang.

Faktor kemiskinan berdampak terhadap tingkat pendidikan masyarakat, meskipun demikian gerakan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan dana desa, bantuan dana bos untuk anak sekolah, bantuan raskin untuk masyarakat dan lain-lain.

Program Wajib belajar 9 tahun di Indonesia tuntas Tahun 2008 namun masih ada hambatan terutama di daerah terpencil sehingga angka partisipasi pendidikan baru tercapai pada tahun 2019. Angka partisipasi pendidikan naik tetapi angka putus sekolah juga meningkat, tercatat dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2019, jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak .

Renstra Kemendikbud 2020 – 2024 adalah wajib belajar 9 tahun tuntas , wajib belajar 12 tahun meningkat dan diprioritaskan pada keluarga miskin . Kesiapan keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso dalam menyongsong program wajib belajar 12 tahun maka

perlu mengetahui gambaran pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kecamatan Kotakulon Kabupaten Bondowoso

KONSEP TEORI

Pendidikan sebagai aktifitas kehidupan individu atau kelompok masyarakat berlangsung secara terus-menerus, kegiatan pendidikan tersebut dapat terjadi di lingkungan :

(a) Formal atau lembaga-lembaga pendidikan baik jenjang dan jenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, atau

(b) Nonformal yaitu satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengikuti pendidikan di luar sistem persekolahan sekarang ini di indonesia dikenal dengan pendidikan luar sekolah, dan

(c) Informal atau lembaga pendidikan keluarga yang memiliki peran penting karena sebagai tempat atau lingkungan pendidikan yang utama dan pertama bagi setiap individu (sudjana, 2000:47).

Menurut ahmadi, dkk (2007:167), mendapatkan kehidupan yang layak adalah dambaan setiap orang. Yang dimaksud dengan layak adalah dalam bidang ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah dalam bidang pendidikan.

Belajar merupakan key term (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai

disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan, misalnya psikologi belajar. Sedemikian penting arti belajar, bagian terbesar riset dan eksperimen psikologi belajar pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia.

Tim Redaksi NPM (2009) menyatakan bahwa strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi menjadi 3 pilar pembangunan pendidikan, yaitu:

- 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan,
- 2) Mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan
- 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Teori Belajar

Secara pragmatis, teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Di antara sekian banyak teori yang berdasarkan hasil eksperimen terdapat tiga macam yang sangat menonjol, yakni: Connectionism, Classical Conditioning dan Operant Conditioning. Teori-teori tersebut merupakan ilham yang mendorong para ahli melakukan eksperimen-eksperimen lainnya untuk mengembangkan para ahli teori-teori baru yang juga berkaitan dengan belajar seperti Contiguous Conditioning (Guthrie), Sign Learning (Tolman), Gestalt Theory, dan lain sebagainya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa;
2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa;
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

Pelaksanaan Wajib Belajar

UU No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan MI/ bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education, seperti yang

dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri-ciri:

- (1) Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah,
- (2) Diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar,
- (3) Tolak ukur wajib belajar 9 tahun adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah, dan
- (4) Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah (Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan UPI, 2007:121).

Pelaksanaan pendidikan dasar untuk semua tentunya diperlukan ketentuan tertentu sebagaimana di dalam Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan yang diadopsi oleh Sidang Umum bulan Desember Tahun 1986. Kewajiban Negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tersedianya sarana, seperti: gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya (appealability),
- 2) Keterjangkauan (accessability) sarana pelaksanaan wajib belajar),
- 3) Penerimaan (acceptability) yaitu diterima tidaknya bentuk kelembagaan pendidikan oleh rakyat, dan

- 4) Kesesuaian (adaptability) yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungannya (Tilaar, 2006:165).

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun

Penelitian Abdillah (2010) menyebutkan bahwa permasalahan dalam program wajib belajar 9 tahun, antara lain: tingkat pendidikan orang tua mempunyai angka partisipasi yang rendah, mata pencaharian/pekerjaan dan pendapatan orang tua mempunyai angka partisipasi yang sangat rendah, karakteristik keluarga berperan dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun, angka partisipasi lingkungan tempat tinggal rendah, kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan terhitung rendah, faktor aksesibilitas tidak terlalu menjadi suatu masalah.

Keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun, menurut Sukardi (2010) dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam individu. Faktor internal, meliputi: kemampuan anak, minat sekolah, ekspektasi (harapan) anak, persepsi siswa tentang sekolah dan aspirasi/cita-cita anak.

Faktor Eksternal yang dipengaruhi oleh keadaan dari luar individu tersebut, meliputi: kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, keutuhan keluarga, persepsi orang tua, dan ketersediaan sarana prasarana.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Karakteristik Keluarga Pra Sejahtera Mei 2021

No	Karakteristik KK	Jumlah	Persentase
1.	Umur - 25 – 50 tahun	10	100%
2.	Pendidikan - Tidak sekolah - SD - SLTP - SLTA	2 7 1 -	20% 70% 10% -
3.	Pekerjaan - Swasta - Buruh tani - Pemulung - Pengamen - Tidak bekerja	1 3 2 3 1	10% 30% 20% 30% 10%
4.	Penghasilan - < 1 juta - 1 juta - < 3 juta	9 1	90% 10 %
5.	Perumahan - Sewa - Semi permanen - Luas rumah <6 m/orang - Ventilasi <10%	6 7 9 8	50% 70 % 90% 80%
6.	KIS/BPJS - Tidak pemunyai KIS/BPJS	10	100%

Tabel 2 Karakteristik Anak Wajib Belajar 9 Tahun

No	Umur	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	7-12 tahun	SD Putus sekolah SD Tidak naik kelas	7 0 0	70% 0 0
2.	13-15 tahun	SLTP Putus sekolah SLTP	3 0	30% 0

		Tidak naik kelas	0	0
--	--	------------------	---	---

PEMBAHASAN

Pada table 1 menunjukkan karakteristik keluarga pra sejahtera, dimana umur KK 100% usia produktif (25-50 tahun) dengan pekerjaan terbanyak yaitu buruh tani dan pengamen masing-masing 30 % sedangkan penghasilan KK 90 % kurang dari 1 juta/bulan bahkan terdapat KK yang tidak bekerja 10%.

BKKBN (2021) Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

Keluarga pra sejahtera RT 35 RW 04.Kellurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang kurang sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga terutama terhadap pelayanan kesehatan bila ada keluarga sakit (tidak mempunyai KIS 100%).

Berhubungan pekerjaan KK sebagai pengamen bahkan ada yang tidak bekerja disebabkan karena pendidikan KK terbanyak adalah SD (70 %) sehingga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dan atau karena sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan.

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang menganggur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah

pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan(Pratama ,2014).

Sumber daya alam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang ialah sumber daya alam yang belum banyak diusahakan, sehingga masih bersifat potensial. Sumber-sumber alam ini belum dapat menjadi sumber yang riil, karena kurangnya kapital, tenaga ahli dan wirausaha (Pratama ,2014)

Tabel 1 juga menunjukkan data indikator keluarga pra sejahtera lainnya dimana data perumahan yang semi permanen sebanyak 70% sehingga dinding,atap maupun lantai kurang layak ditempati . Selain faktor pendidikan orang tua yang kurang juga kondisi rumah dan lingkungan rumah yang kurang mendukung proses belajar anak di rumah.

Faktor kemiskinan berdampak terhadap tingkat pendidikan masyarakat, meskipun demikian gerakan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan dana desa, bantuan dana BOS untuk anak sekolah, bantuan raskin untuk masyarakat dan sebagainya. Jenis pendidikan mulai dari pendidikan formal, nonformal dan informal, sedangkan pengertian pendidikan itu sendiri adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses

perbuatan, cara mendidik (Kuswadinah,2014).

Upaya pendidikan atau pengajaran selain di dapat pada pendidikan formal penting artinya pendidikan berkelanjutan di rumah dan pendidikan di rumah memerlukan dukungan sumberdaya orang tua ,perhatian orang tua dan lingkungan rumah yang mendukung proses belajar anak.

Pada tabel 2 menunjukkan pendidikan anak wajib belajar 9 tahun pada keluarga pra sejahtera RT 35 RW 04.Kellurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yaitu pada pendidikan tingkat SD dan SLTP anak usia 7-15 tahun mencapai 100%. Anak sekolah SD dan SLTP tersebut tidak ada yang tidak naik kelas.

Belum semua anak usia sekolah memperoleh dukungan keluarga yang kondusif. Anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin hanya mendapat layanan pendidikan keluarga yang sangat terbatas. Hal tersebut akan menjadi kendala bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi tersebut, perlu dilakukan pemikiran dan upaya sistematis terhadap pendidikan dalam keluarga khususnya bagi keluarga miskin . Keadaan sosial ekonomi keluarga miskin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak, keluarga yang perekonomiannya cukup dan pendapatannya lebih baik tidak ditekankan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga perhatian orangtua dapat dicurahkan kepada anakanak mereka. (ahmadi, 2003 dalam Ningrum 2012).

Pendidikan yang didapat oleh anak dalam keluarga pra sejahtera, dimana banyak dari orangtua dari keluarga buruh,dan pengamen yang ternyata masih mempunyai kepedulian terhadap pendidikan anak walaupun dengan keadaan ekonomi yang sulit. Anak sebagai anggota keluarga yang memperoleh pendidikan oleh orangtua juga dipekerjakan untuk membantu kehidupan ekonomi, sehingga mempengaruhi tingkah laku, kecerdasan emosional, sampai kecerdasan otak anak. Di sini peran orangtua dalam mendidik anak dalam keluarga diperlukan agar anak dapat memperoleh pendidikan sebagai penunjang pendidikan formal. Dengan demikian kebutuhan akan pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan keluarga pra sejahtera.

Tidak semua anak dapat melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, yang kemudian para orangtua timbul persepsi bahwa kaitannya dengan pekerjaan dan menganggap pendidikan tidak penting apabila nanti anaknya tidak mendapat pekerjaan. Tetapi tidak semua orangtua menganggap bahwa pendidikan anak tidak penting, apabila orangtua memahami akan pentingnya pendidikan serta mendukung dan berperan dalam pendidikan anaknya, maka keberhasilan pada anak akan lebih baik

KESIMPULAN

Keluarga pra sejahtera di RT 35 RW 04 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso bekerja sebagai buruh tani dan bahkan sebagai pengamen

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar keluar terutama dalam perumahan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dampak sosial ekonomi keluarga pra sejahtera pada pendidikan anak wajib belajar tidak menyurutkan semangat orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang SLTP. Dengan bantuan dana BOS sangat membantu anak keluarga pra sejahtera dalam memperoleh pendidikan formal. Kurangnya pendidikan keluarga pada anak di rumah dalam mendukung pendidikan formal karena orang tua bekerja dan anak membantu orang tua bekerja.

SARAN

Peningkatan lapangan pekerjaan atau pemanfaatan lahan dari investor sangat diperlukan keluarga pra sejahtera. dan pentingnya peningkatan program Pendidikan Keluarga Sejahtera (PKK) pada keluarga pra sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Duana Bagus. 2010. Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemasang. Skripsi. Semarang: FIS UNNES.

Ahmadi, Abu. 2003. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.

BKKBN 2021 ,Batasan dan pengertian Pemutakhiran Data Keluarga Copyright © 2011 [Bkkbn](#). All Right Reserved.

Ibid, h 63.

Kuswardinah, 2014 Model Pendidikan Kesejahteraan Keluarga bagi Keluarga Miskin di Pedesaan Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 31 Nomor 2 Tahun 2014.

Muhibbin Syah. Psikologi Belajar (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h 145.

Ningrum ,2012 Profil Pendidikan Keluarga Miskin (Studi Pada Keluarga Buruh di Perkebunan Teh Pagilaran Journal of Non Formal Education and Community Empowerment <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

Pratama 2014, Analisis Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Nomor 2, Agustus 2014.

Sudjana, Ahmad. 2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. 2010. Kondisi Anak tidak dan atau Putus i.2 010.Jenjang Pendidikan Dasar pada Masyarakat Marginal di NTB:ke Arah Percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun disajikan pada Simposiom Nasional Penelitian dan Inovasi Pendidikan tanggal 3-5 Agustus 2010 dapat diunduh pada http://www.puslitjak.org/data/docs/2010/makalah_kelompok/ke11/19-108_sukardi_ppt.pdf (12/10/21).

Tilaar. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan
UPI. 2007. Ilmu dan Aplikasi
Pendidikan. Bandung: PT.
Imperial Bakti Utama.

Tim Redaksi NPM. 2009. Penuntasan
Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta:
Depdikbud.

Tohirin, Psikologi Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam
(Berbasis Integrasi dan
Kompetensi) (Jakarta:Raja
Grafindo Persada,2005) , hlm
54.